

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIK TANPA IZIN EDAR BPOM
(STUDI KABUPATEN BINTAN)**

**Oleh
Aurelia Agatha
NIM. 2105040057**

ABSTRAK

Peredaran kosmetik ilegal di Kabupaten Bintan yang berpotensi membahayakan konsumen, Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah produksi kosmetik. Akan tetapi, Loka POM di Kota Tanjungpinang mengalami kekalahan di tahap praperadilan dikarenakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan cacat formil. Adanya regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 yang mewajibkan kosmetik memiliki izin edar dan memenuhi standar keamanan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memahami bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik tidak terdaftar BPOM di Kabupaten Bintan, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku dan juga guna mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh konsumen terkait kasus distribusi kosmetik tanpa izin edar di Kabupaten Bintan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yang menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan (pendekatan perundang-undangan) dan data lapangan (penelitian lapangan). Hasil dari penelitian ini ialah Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan penggeledahan dan penyitaan 80 item kosmetik ilegal dari sebuah rumah produksi di Tanjung Uban, Bintan Namun, dalam Praperadilan Loka POM mengalami kekalahan dikarenakan penggeledahan tidak sesuai dengan aturan. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah rodok tersebut terbukti tanpa izin edar BPOM. Proses hukum sempat terhambat karena putusan praperadilan yang menyatakan tindakan penyidikan Loka POM cacat formil. Meskipun demikian, Loka POM tetap menekankan pentingnya penegakan hukum dan mengimbau pelaku usaha untuk melengkapi izin edar dan produksi. Penyelesaian sengketa yang dilakukan konsumen terhadap kasus kosmetik ilegal di Kabupaten Bintan umumnya menghadapi kendala dalam proses hukum. Akan tetapi konsumen bisa melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, dan juga dapat dilakukan melalui mekanisme non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, atau konsiliasi agar penyelesaian sengketa menjadi lebih cepat dan efisien.

Kata Kunci: Konsumen, Kosmetik, Ilegal.

**CONSUMER PROTECTION AGAINST CIRCULATION
COSMETICS WITHOUT BPOM DISTRIBUTION PERMIT
(BINTAN REGENCY STUDY)**

**By
Aurelia Agatha
NIM. 2105040057**

ABSTRACT

The circulation of illegal cosmetics in Bintan Regency that has the potential to endanger consumers, the POM Workshop in Tanjungpinang City conducted searches and seizures at cosmetics production houses. However, the POM Workshop in Tanjungpinang City suffered defeat in the pretrial stage due to the search and confiscation carried out by formal defects. There are regulations such as the Consumer Protection Law No. 8 of 1999 and the Health Law No. 17 of 2023 which require cosmetics to have a distribution permit and meet safety standards. The purpose of this study is to understand the form of legal protection for consumers who are harmed by the use of cosmetics not registered by BPOM in Bintan Regency, in accordance with the applicable Consumer Protection Law and also to find out the dispute resolution efforts carried out by consumers related to the case of distribution of cosmetics without a distribution permit in Bintan Regency. This research method uses a normative-empirical approach, which combines analysis of laws and regulations (legislative approach) and field data (field research). The result of this study is that Loka POM in Tanjungpinang City conducted a search and confiscation of 80 illegal cosmetic items from a production house in Tanjung Uban, Bintan. However, in the Pretrial Loka POM suffered defeat because the search was not in accordance with the rules. The conclusion in this study is that the product was proven without BPOM's distribution permit. The legal process was hampered by a pretrial decision that stated that the investigation action of the POM Loka was formally flawed. Nevertheless, Loka POM still emphasizes the importance of law enforcement and appeals to business actors to complete distribution and production permits. Dispute resolution carried out by consumers against illegal cosmetics cases in Bintan Regency generally faces obstacles in the legal process. However, consumers can resolve disputes through litigation, and can also be done through non-litigation mechanisms such as mediation, arbitration, or conciliation so that dispute resolution becomes faster and more efficient.

Keywords: Consumer, Cosmetics, Illegal.